

**PEMBERDAYAAN MADRASAH DAN STANDARISASI
PENDIDIKAN**
**Telaah Kritis Terhadap Partisipasi STAIN dalam Pemberdayaan
Madrasah Aliyah di Kabupaten Ponorogo**
*Moh. Miftachul Choiri **

Abstrak:

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, bukan semata-mata karena faktor jumlah peserta didiknya yang signifikan tetapi juga karakteristik madrasah yang relevan dengan semangat reformasi sistem pendidikan nasional. (pemerataan, education for all, desentralisasi, dll). Di tengah-tengah upaya pemerintah menggulirkan kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, madrasah sudah sangat terbiasa dengan esensi kebijakan tersebut. Karena kebanyakan madrasah lahir dari masyarakat (swasta) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak-anak mereka. Dalam sejarah perkembangannya yang panjang, madrasah memiliki banyak hal yang positif dan negatif. Sisi positif madrasah, di antaranya adalah lembaga pendidikan ini lahir dari masyarakat bawah dan terbiasa mandiri. sisi negatif, antara lain adalah berkembangnya sikap ortodoksi yang ditunjukkan sebagian besar madrasah akibat adanya perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah kolonial dan Orde Baru. Namun di saat madrasah dihadapkan pada kebijakan standarisasi pendidikan melalui PP. 19 Tahun 2005, banyak persoalan yang menyenuak dan perlu dipecahkan oleh madrasah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat persiapan Madrasah Aliyah menyongsong era standarisasi pendidikan dan bagaimana peran perguruan tinggi agama Islam, dalam membantu madrasah menghadapi penerapan kebijakan tentang standarisasi pendidikan.

Kata Kunci: pemberdayaan, Madrasah Aliyah, standar nasional pendidikan, perguruan tinggi agama Islam

* Penulis adalah dosen Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial terjadi begitu cepat, seakan-akan tidak dapat dir espon oleh agama Islam atau pemeluknya sehingga dalam pengembangan pengetahuan agama Islam sendiri banyak yang dilakukan secara doktriner, normatif dan legalistik.¹ Sebagai akibatnya banyak kaum muslim yang berfikir doktriner dan normatif. Cara berfikir yang demikian tentu menimbulkan problem baru dalam kehidupan bermasyarakat dalam artian luas. Karena problem kehidupan yang dihadapi masyarakat saat ini lebih kompleks sebagai dampak adanya globalisasi, sehingga tidak hanya butuh pendekatan normatif dan legalistik, melainkan pendekatan yang komprehensif dan memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

Untuk mentransformasikan cara berfikir yang demikian, tentu diperlukan adanya paradigma baru dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Peranan lembaga pendidikan menjadi sangat diperlukan sebagai tempat untuk mengasah daya berfikir kritis dan evaluatif. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan formal seharusnya mengajarkan cara berpikir tersebut. Pembelajaran model "konsep bank" (*the banking concept of education*),² bukan problem *posing education* sudah saatnya ditinggalkan, karena konsep yang demikian diasumsikan sudah tidak layak lagi dan kurang relevan dengan konteks pembelajaran sekarang. Karena pembelajaran yang bersifat doktriner, hanya akan membuat si pembelajar menjadi pasif, tidak memiliki kreatifitas dan daya nalar yang kritis dan analitis.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal Islam, sebenarnya mempunyai banyak potensi dan keunikan. Sebagai lembaga pendidikan yang berdiri dan lahir dari masyarakat, keberadaan madrasah sangat penting dan diperlukan masyarakat, terutama berkaitan dengan perannya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan untuk memenuhi keperluan jenjang pendidikan formal bagi masyarakat. Hal ini tidak terlalu berlebihan, mengingat biaya pendidikan di madrasah dari tinjauan ekonomis, memerlukan biaya pendidikan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan lembaga pendidikan di luar madrasah. Namun demikian bukan berarti madrasah tidak mengalami kesulitan dan berbagai

1 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Ciputat: Logos, 2000), 160.

2 Azra, *Pendidikan Islam*, 163.

problem, terutama terkait dengan pembiayaan. Secara sosiologis, hampir sebagian besar orang tua murid di madrasah berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Hanya pada madrasah ibtidaiyah favorit saja yang orang tua muridnya berlatar belakang ekonomi menengah ke atas.

Selain problem tentang pembiayaan, kini madrasah dihadapkan pada masalah kualitas pendidikan. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah dan minimnya program-program peningkatan mutu guru madrasah, terbatasnya pembinaan dalam pengelolaan manajemen madrasah menjadi persoalan yang serius dan membutuhkan pemecahan dari semua pihak, terutama Kementerian Agama RI. Sejalan dengan diputuskannya berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, tentu madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional turut kena dampak atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, mengharuskan madrasah negeri maupun swasta untuk menerapkan berbagai regulasi yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh; madrasah juga diharuskan mengikuti Ujian Nasional, menerapkan kurikulum 2006, menerapkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan kompetensi, Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23 tahun 2006, sertifikasi guru dan standarisasi mutu pendidikan.

Menunggu pembinaan dari pemerintah secara intens, khususnya Kementerian Agama RI terasa sulit dan terkesan prosedural. Meskipun ada pembinaan yang dilakukan pemerintah, secara kuantitas terbatas, belum sebanding dengan jumlah madrasah yang ada dan kualitasnya juga masih dipertanyakan. Kenyataan inilah kemudian menginspirasi pentingnya perguruan tinggi agama Islam, untuk melakukan berbagai program pembinaan dan pendampingan bagi madrasah. Karena secara konseptual kehadiran perguruan tinggi agama Islam di madrasah sangat dibutuhkan, terutama dalam penyebaran hasil temuan-temuan dan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam.

H.A.R. Tilaar berpendapat bahwa suatu lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai nilai akuntabilitas, apabila lembaga tersebut terlepas

dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang memilikinya.³ Pendidikan tinggi yang bertahta di atas menara gading tentu tidak mempunyai akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi, maka perlu memperhatikan kepentingan pengguna jasa pendidikannya dalam hal ini masyarakat. Perguruan tinggi agama Islam secara historis mempunyai keterkaitan dengan madrasah sebagai jenjang pendidikan di bawahnya. Oleh sebab itu, agar berbagai program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam mempunyai relevansi dengan program pembelajaran di madrasah, secara induktif mestinya program-program yang didesain oleh perguruan tinggi Islam mempertimbangkan kepentingan madrasah dan masyarakat muslim.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo merupakan satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri di wilayah eks karesidenan Madiun. Wilayah eks karesidenan Madiun meliputi 6 (enam) kabupaten antara lain; Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang jauh dari perguruan tinggi negeri lainnya merupakan peluang sekaligus tantangan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni dharma pengabdian masyarakat. Sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo secara moral berkewajiban untuk mentransformasikan berbagai hasil inovasi yang dikembangkan kepada berbagai lembaga pendidikan tingkat menengah, khususnya madrasah-madrasah yang berada di wilayah eks karesidenan Madiun.

Sejak tahun akademik 2004, STAIN Ponorogo melakukan berbagai kegiatan untuk merealisasikan salah satu amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain; workshop Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) bagi Madrasah Aliyah Swasta se-eks Karesidenan Madiun, workshop Pengelolaan Perpustakaan untuk Madrasah se-eks Karesidenan Madiun, workshop Pengelolaan Masjid Sekolah untuk Madrasah Aliyah se-eks Karesidenan Madiun, workshop Desain Pembelajaran untuk Guru Madrasah Aliyah se-eks Karesidenan Madiun, Workshop Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) bagi Madrasah

3 H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2004), 111.

Aliyah se-Kabupaten Ponorogo, program Kuliah Kerja Nyata dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR)⁴ dan berbagai program pendampingan bagi madrasah yang lainnya.

Berbagai program yang telah diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo difokuskan pada pelaksanaan peningkatan mutu madrasah, kemudian diberi label dengan kegiatan Madrasah Binaan STAIN Ponorogo. Madrasah-madrasah yang selama ini menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat STAIN Ponorogo adalah madrasah-Madrasah Aliyah swasta di wilayah eks karésidenan Madiun.⁵ Pemilihan Madrasah Aliyah swasta sebagai sasaran pelaksanaan kegiatan madrasah binaan di antaranya diilhami oleh adanya kenyataan bahwa madrasah-madrasah swasta cenderung mendapatkan pelayanan yang lambat dibandingkan madrasah-madrasah negeri⁶. Kenyataan lain, hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan madrasah swasta didanai oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan, yang secara ekonomis mereka berada pada level masyarakat tidak mampu. Kenyataan ini semakin menguatkan hipotesa bahwa madrasah-madrasah swasta membutuhkan adanya berbagai kegiatan pendampingan yang berorientasi pada penguatan modal sosial yang telah dimiliki madrasah dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dimaksudkan, agar madrasah sebagai institusi pendidikan Islam, terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengguna jasa pendidikannya.

Berangkat dari berbagai persoalan yang dihadapi madrasah dan pentingnya perguruan tinggi agama Islam untuk mereposisi perannya dalam masyarakat, maka tulisan ini akan mengungkap tentang " PEMBERDAYAAN MADRASAH DAN STANDARISASI PENDIDIKAN: Telaah Kritis Terhadap Partisipasi STAIN dalam Pemberdayaan Madrasah Aliyah di Kabupaten Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1) Apa yang melatarbelakangi pent-

4 Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN periode 2006-2010, pada Acara Pembukaan Workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Guru Madrasah Aliyah Swasta Se-Kabupaten Magetan di Madrasah Aliyah Muro'atud Din Magetan pada tanggal 28 April 2007.

5 Workshop Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di empat wilayah pemerintahan daerah kabupaten Magetan, Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo, yang dimulai tanggal 28 April 2007 dan berakhir tanggal 23 Mei 2007

6 Sementara itu, menurut PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tidak ada lagi diskriminasi antara lembaga pendidikan swasta dan negeri, keduanya sama berhak untuk mendapatkan perhatian secara adil dari Pemerintah

ingnya program pemberdayaan bagi Madrasah Aliyah di kabupaten Ponorogo oleh STAIN Ponorogo?; 2) Bagaimanakah respon Madrasah Aliyah di Ponorogo terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh STAIN Ponorogo?

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa kajian konsep dan teori yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain: perguruan tinggi Islam, standar nasional pendidikan, globalisasi, pengabdian masyarakat, madrasah dan pemberdayaan, peran pendidikan tinggi Islam dalam era standarisasi pendidikan dan teori sosial; teori kritis dan fungsionalisme struktural.

1. Perguruan Tinggi Islam

Perguruan tinggi yang ideal adalah universitas yang menggabungkan tiga tradisi, yaitu tradisi *undergraduate* Britania dengan *college* model Oxford dan Cambridge yang berorientasi riset model Jerman dan model pengabdian masyarakat ala Amerika Serikat.⁷ Dalam konteks Indonesia, konsep perguruan tinggi yang ideal tersebut sebenarnya telah dituangkan dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang intelektual dan profesional, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat merupakan hakekat dari Tri Darma Perguruan Tinggi.⁸ Hanya persoalannya adalah sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia telah mempengaruhi kehidupan masyarakat? Nampaknya keberadaan perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat memberikan jawaban yang positif bagi problem yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh di musim kemarau, masyarakat dihadapkan pada krisis air yang berkepanjangan, di musim penghujan, terjadi banjir dimana-mana, terkait dengan problem sosial keagamaan, di mana-mana kita saksikan kekerasan horisontal yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Pertanyaannya sudahkah perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi memecahkan problem yang dihadapi masyarakat tersebut? Nampaknya terlalu banyak fakta atau bukti yang menunjukkan betapa lemahnya darma riset dan pengabdian masyarakat yang belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

7 Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), 219

8 Ibid, 220.

H.A.R. Tilaar berpendapat bahwa dalam rangka menyongsong era globalisasi, perguruan tinggi penting melakukan perubahan paradigma.⁹ Paradigma tersebut berkaitan erat dengan akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi kelembagaan dan jaringan kerjasama. Terkait dengan akuntabilitas sebuah perguruan tinggi dapat dilihat sejauhmana perguruan tinggi tersebut memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat di sekitarnya, konstituennya dan pengguna jasanya. Dimensi relevansi, menjelaskan bahwa program-program pendidikan yang dirancang oleh perguruan tinggi secara nyata memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah perguruan tinggi yang memiliki akuntabilitas rendah pasti program pendidikannya tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Dimensi kualitas, menjelaskan bahwa perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan sumberdaya manusia yang menjadi penggerak dan pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi harus mampu melaksanakan riset, baik yang diperlukan masyarakat sekitarnya maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagaimana dengan perguruan tinggi Islam dalam menghadapi globalisasi? Menurut Samsul Nizar dkk,¹⁰ perguruan tinggi Islam pada umumnya dihadapkan pada problem yang bersumber dari internal kelembagaan yaitu rendahnya citra perguruan tinggi agama Islam di mata masyarakat. Citra yang rendah tersebut diperkuat oleh kenyataan banyaknya lulusan PTAI yang meskipun memiliki ijazah dan gelar sarjana, mutunya dianggap di bawah standar yang diharapkan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, sudah saatnya PTAI untuk berubah dan memperbaiki diri, dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kampus, meningkatkan kualitas dosen dan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa sebagai pengguna jasa pendidikan.

Ditegaskan oleh H.A.R Tilaar, PTAI di Indonesia dewasa ini didirikan sesuai dengan tuntutan jaman yang melatarbelakanginya. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi kiranya perlu PTAI untuk meninjau kembali paradigma yang telah mendasari lahirnya PTAI. Peninjauan paradigma tersebut bukan berarti meragukan eksistensi lembaga di bawah naungan PTAI, melainkan lebih merupakan reformulasi untuk menjawab perubahan-perubahan dunia yang berubah

9 Tilaar, *Paradigma Baru*, 109.

10 Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 268.

11 Ibid, 268.

dengan cepat. Menurut Tilaar, paradigma yang dikembangkan oleh PTAI, selama ini terkesan kurang visioner dan kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan nasional.¹² Alasan ini tidak terlalu berlebihan, karena bidang kajian keilmuan yang dikembangkan di PTAI kurang membumi. Contoh yang paling nyata adalah minimnya kontribusi perguruan tinggi agama Islam dalam mengurangi kenakalan remaja, penyimpangan akhlak yang dilakukan para pemuda/pemudi, mencegah terorisme, memberi masukan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang terkait dengan konflik antar agama atau antar agama. Oleh sebab itu, penting kiranya, PTAI merumuskan kembali kurikulum pendidikannya, memperbaiki proses perkuliahannya, meningkatkan perannya dalam membantu masyarakat memecahkan masalah sehingga akuntabilitas dan kredibilitas PTAI mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya peran lembaga tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, H.A.R Tilaar¹³ menegaskan bahwa untuk memasuki milenium ketiga dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, maka paradigma lama dalam mengelola perguruan tinggi harus dirubah. Karena persaingan begitu ketat, standar mutu pendidikan semakin terukur, lulusan yang berkualitas dapat mengambil peran dalam kehidupan masyarakat, sementara mereka yang tidak berkualitas harus rela menjadi penonton dan pengguna produk. Oleh karena itu, paradigma baru dalam mengelola perguruan tinggi perlu dirumuskan kembali, tak terkecuali perguruan tinggi agama Islam. Salah satu cara merubah paradigma tersebut adalah dengan melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, di antaranya adalah merajut kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian dan berbagai institusi yang dapat mendukung kemajuan perguruan tinggi. Menurut H.A.R. Tilaar¹⁴ terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan posisi sebuah perguruan tinggi dalam percaturan global. Unsur tersebut meliputi dimensi lokal, yang terdiri dari; 1) akuntabilitas; 2) relevansi; 3) kualitas; 4) otonomi kelembagaan;

12 H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi pendidikan Nasional* (Magelang: Tera Indonesia, 1999), 200.

13 H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta. 2004), 109.

14 *Ibid*, 110-113

dan 5) jaringan kerjasama. Sedangkan unsur dimensi global mempunyai 3 aspek, antara lain; 1) kompetitif; 2) kualitas; dan 3) jaringan.

Akuntabilitas suatu lembaga perguruan tinggi berarti sejauhmana lembaga tersebut mempunyai makna *the share holder* lembaga tersebut, yakni masyarakat. Suatu lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai nilai akuntabilitas apabila lembaga tersebut terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang memilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pendidikan tinggi bukan sekedar sebagai lembaga untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai industri jasa. Dengan kata lain, pendidikan tinggi perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan ekonomi atau tenaga kerja yang diperlukan masyarakat atau daerah dimana perguruan tinggi tersebut berada. Dalam hal ini perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu mengikuti prinsip *land-grant college* Amerika Serikat, yang mana orientasi program ini ditujukan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dengan cara perguruan tinggi memenuhi pembangunan suatu daerah hasil kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah federal.

Relevansi yang dimaksud dalam kajian ini adalah relevansi program-program yang dirancang perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, partisipasi dunia kerja dan industri merupakan suatu keharusan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebuah perguruan tinggi yang tidak mempunyai akuntabilitas sudah dapat dipastikan juga tidak mempunyai relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya dimaknai kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan moral dan etika serta agama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Kualitas dalam konteks ini mempunyai arti bahwa perguruan tinggi merupakan sumber daya manusia tingkat tinggi yang akan menjadi pemimpin dan penggerak masyarakatnya. Untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan tinggi maka diperlukan tenaga-tenaga dosen yang bermutu tinggi. Sejalan dengan hal itu, lembaga tinggi harus mampu untuk melaksanakan riset, baik riset yang diperlukan masyarakat maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, perguruan tinggi tidak dapat berdiri sendiri. Kerja sama dalam bentuk kemitraan yang sejajar antara PTN dengan PTN, be-

gitu juga kerjasama antara PTN dengan PTS haruslah merupakan jaringan kemitraan yang saling membantu. Tentu saja di dalam kerjasama tersebut perlu dikultivasi persaingan yang sehat sehingga terjadi kemajuan di dalam perkembangan universitas masing-masing. Kerjasama dengan perguruan tinggi perlu dilengkapi dengan kerjasama dengan dunia industri, lembaga-lembaga konsumen yang memerlukan lulusan-lulusan perguruan tinggi. Kerjasama juga dibutuhkan juga dengan lembaga-lembaga riset yang ada dalam dunia industri dan masyarakat. Dengan demikian adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri saling menguntungkan sehingga keduanya akan saling mengambil manfaat dari kerjasama yang produktif dari lembaga-lembaga tersebut.

2. Madrasah Aliyah dan Pemberdayaan

Madrasah Aliyah merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah yang mempunyai peran strategis dalam menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (UUSPN. No. 20 Tahun 2003, pasal 17). Sebagai jenjang pendidikan tingkat menengah, madrasah aliah mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah pada umumnya. Ciri khusus tersebut antara lain; beban mata pelajaran mempunyai bobot yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah dasar pada umumnya, khususnya rumpun mata pelajaran agama Islam, terdiri dari: bidang studi Fiqh, bidang studi Qur'an Hadits, bidang studi Aqidah Akhlak, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam dan bidang studi bahasa Arab. Ciri khusus lainnya, madrasah mempunyai kedekatan tradisi dengan pesantren yang mengajarkan kesederhanaan, *modelling*, mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada dasar ajaran Islam dan mempunyai budaya keilmuan yang tinggi.¹⁵

Historitas tersebut mempunyai arti bahwa, perbedaan intensitas pembelajaran agama di sekolah dan madrasah merupakan hasil diskusi panjang yang melibatkan para tokoh dan pakar bahkan lintas departemen, antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama.¹⁶ Hasil diskusi panjang tersebut misalnya pendapat Ki Hajar Dewantara, yang menganggap pendidikan agama hanya sebagai bagian dari pendidikan budi

¹⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002), 31.

¹⁶ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Dunia Modern* (Jakarta: LPES, 1994), 89-99.

pekerti dan tidak setuju dengan pendidikan agama sebagai pengantar fiqh secara umum dalam agama Islam.¹⁷ Pendapat lain misalnya, pada tahun 1970 Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama yang bertujuan agar semua kelas tertinggi SD dan SMP mendapatkan 6 jam pelajaran agama per minggu. Akan tetapi usaha tidak berhasil karena pihak Departemen Pendidikan dan kebudayaan tidak menyetujuinya.¹⁸ Tentu perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi berbagai alasan dan pandangan masing-masing departemen maupun tokoh.

Terlepas dari perdebatan tentang intensitas pembelajaran agama di sekolah ataupun madrasah, pembahasan justru yang penting untuk diteliti adalah manfaat pendidikan agama bagi peletakan pondasi kepribadian peserta didik di tingkat dasar, sehingga diharapkan mampu memberikan bangunan yang kuat bagi pengembangan kepribadian anak. Mengapa hal ini diperlukan? Sebagai bangsa yang mempunyai pandangan hidup Pancasila, tentu pendidikan agama sangat diperlukan. Di tengah-tengah derasnya arus globalisasi, pendidikan Indonesia dihadapkan pada pergumulan nilai-nilai global yang berasal dari luar yang belum tentu semuanya dapat memberikan manfaat bagi penguatan pembentukan kepribadian masyarakat Indonesia. Intensitas pembelajaran agama Islam di madrasah Ibtidaiyah sebenarnya diharapkan mampu membekali peserta didik agar memiliki pondasi kepribadian yang kuat.

Namun fakta pembelajaran agama Islam di Madrasah Aliyah yang terjadi belum seperti yang banyak diharapkan. Pendidikan di Madrasah Aliyah dianggap belum mampu membekali peserta didik untuk menjadi pribadi yang islami. Intensitas pembelajaran agama Islam yang memakan alokasi waktu yang lebih banyak, seharusnya memberikan bangunan yang kuat bagi penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam. Hanya disayangkan, pembelajaran materi agama Islam tersebut belum dapat sepenuhnya memberikan pondasi yang kuat bagi terbentuknya kepribadian anak yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Terdapat beberapa penyebab, mengapa pembelajaran agama Islam belum sepenuhnya berhasil. Menurut Muhaimin¹⁹ titik lemah pendidikan agama terletak pada komponen metodologinya. Kelemahan tersebut

17 Ibid, 20

18 Ibid, 94

19 Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 25.

diidentifikasi sebagai berikut: (1). Kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik; (2). Kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama; dan (3). Kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, dan/atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Berbagai kelemahan di atas dapat dipecahkan melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam konteks ini harus dipahami sebagai upaya penyadaran akan pentingnya peran pendidikan agama Islam di tengah-tengah perubahan globalisasi. Oleh karena itu, agar peran pendidikan yang diselenggarakan madrasah memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, maka kualitas pendidikan di madrasah harus diperbaiki dan ditingkatkan mutunya melalui berbagai program kemitraan dan partisipasi perguruan tinggi agama Islam. Pengembangan kurikulum, penyusunan silabi, pengembangan RPP, pengelolaan madrasah yang baik, kepemimpinan kepala madrasah, aplikasi standar nasional pendidikan, merupakan berbagai masalah yang dihadapi oleh madrasah menuntut segera dipecahkan.

Maka dari itu, makna pemberdayaan perlu dihubungkan dengan keunikan di madrasah, bahwa madrasah mempunyai ciri khas bahwa pendidikan yang ada di dalamnya bukan sekedar didekati dengan pendekatan keilmuan-akademis, tetapi juga didekati secara keagamaan (Islam). Pendekatan keilmuan-kademis mengasumsikan perlunya kajian kritis, rasional, obyektif-empirik. Sedangkan pendekatan keagamaan mengansumsikan perlunya pembinaan dan pengembangan komitmen (pemihakan) terhadap ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup muslim yang diwujudkan dalam sikap hidup dan ketrampilan hidup. Kedua pendekatan tersebut sulit terwujud di madrasah jika tidak didukung oleh komitmen akademis-religius dari para pengelolanya.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan data tentang latar belakang lahirnya kegiatan madrasah binaan, data tentang respon Madrasah Aliyah binaan terhadap program madrasah binaan STAIN Ponorogo dan pelaksanaan standarisasi pendidikan di Madrasah Aliyah.

1. Latar Belakang Lahirnya Kegiatan Madrasah Binaan

Secara historis, lahirnya kegiatan madrasah binaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, diilhami adanya keinginan untuk meningkatkan intensitas pengabdian STAIN Ponorogo kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dimaknai bukan sekedar sekumpulan orang yang hidup dalam satu komunitas di daerah tertentu, akan tetapi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai komunitas akademis di sekitar wilayahnya.

Pengabdian yang dilakukan di berbagai komunitas akademis di beberapa wilayah sekitar kabupaten Ponorogo, diharapkan semakin mendekatkan hubungan antarinstitusi pendidikan agama Islam, di antaranya adalah beberapa Madrasah Aliyah swasta dengan STAIN Ponorogo. Karena bagaimanapun juga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo sebagai sebuah institusi perguruan tinggi agama Islam sangat membutuhkan in-put yang berasal dari berbagai Madrasah Aliyah baik swasta maupun negeri di sekitar wilayah kabupaten Ponorogo. Di sisi lain Madrasah Aliyah swasta di sekitar wilayah kabupaten Ponorogo juga memerlukan berbagai kegiatan pelatihan guru-gurunya. Pengabdian STAIN Ponorogo lebih diutamakan bagi para guru dan pengelola Madrasah Aliyah swasta. Karena disinyalir bahwa Madrasah Aliyah swasta di sekitar wilayah kabupaten Ponorogo sangat minim memperoleh bantuan pelatihan yang secara akademis dapat dijadikan sebagai piranti untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Sementara Madrasah Aliyah negeri diasumsikan telah dapat merencanakan berbagai kegiatan peningkatan mutu gurunya dengan label negerinya, sehingga fokus madrasah binaan STAIN Ponorogo lebih diarahkan kepada beberapa madrasah swasta di sekitar kabupaten Ponorogo.

Program madrasah binaan STAIN Ponorogo, mulai dirintis pada tahun 2007 di bawah kepemimpinan Ketua STAIN Ponorogo, Drs. H.A. Rodli Makmun, M.Ag²⁰. Sebagai pelaksana kegiatan pada saat itu, P3M

20 Hasil wawancara dengan kepala P3M STAIN Ponorogo, Periode 2010-2014.

(Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang dikepalai oleh A. Muchaddam Fahham, MA dan UPMA (Unit Peningkatan Mutu Akademik) diketuai oleh Drs. Ju' Subaidi, M.Ag. Berbagai kegiatan pelatihan guru bagi Madrasah-Madrasah Aliyah swasta mulai dilakukan secara intens pada awal 2007, di antara kegiatan tersebut adalah Pelatihan Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Pacitan, Pelatihan Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Trenggalek, Pelatihan Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Ponorogo, Pelatihan Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Magetan, Pelatihan Penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Ngawi dan Pelatihan Penyusunan KTSP bagi guru-guru Madrasah Aliyah di wilayah kabupaten Madiun.

Pada tahun berikutnya kegiatan madrasah binaan bagi guru-guru Madrasah Aliyah lebih bervariasi muatan materinya, di antaranya adalah Penelitian Tindakan Kelas, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Penguatan KTSP dan Penyusunan RKM (Rencana Kegiatan Madrasah), Penyusunan Karya Tulis Bagi Siswa dan lain sebagainya. Berbagai program untuk madrasah binaan didesain sesuai dengan isu yang sedang berkembang pada itu, belum didasarkan pada sebuah analisis kebutuhan madrasah. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena hubungan struktural yang mengikat antara Madrasah Aliyah dan STAIN Ponorogo. Hubungan kegiatan tersebut tidak lebih sebagai panggilan emosional sesama lembaga pendidikan agama Islam, yang tentu diharapkan dapat bersinergi, sehingga akan menghasilkan kemajuan bersama, terutama dalam memajukan kualitas lembaga pendidikan Islam. Terlebih ketika terdapat tuntutan, diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Secara kelembagaan, yang membidangi kegiatan pembinaan Madrasah Aliyah sejatinya adalah Mapenda Departemen Agama Republik Indonesia, namun demikian madrasah-Madrasah Aliyah swasta jarang tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan secara umum, apalagi berkaitan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu tuntutan dan arahan untuk segera memenuhi berbagai standar nasional pendidikan sebagaimana yang termak-

tub dalam PP. No. 19 Tahun 2005 yang terdiri delapan standar memang ada, namun pembinaan ke arah terpenuhinya delapan standar pendidikan tersebut minim, walaupun tidak terbilang jarang. Padahal terdapat wacana bahwa beberapa lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar sebagaimana yang telah diatur dalam PP. No. 19 Tahun 2005 akan di-*regrouping* ataupun di-*merger* dengan lembaga yang memenuhi standar yang berada di sekitarnya.

Kebijakan yang demikian tentu amat menguatirkan bagi kebanyakan pengelola Madrasah Aliyah. Hal ini tentu tidak berlebihan karena kebanyakan Madrasah Aliyah lahir dari inisiatif masyarakat sebagai respon kepedulian masyarakat terhadap pendidikan agama Islam. Biaya pendidikan yang murah, intensitas muatan materi pendidikan agama Islam yang lebih, pembiasaan beribadah yang intens menjadi beberapa alasan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Aliyah swasta. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan, program madrasah binaan STAIN Ponorogo tetap diharapkan oleh berbagai Madrasah Aliyah, terutama madrasah-Madrasah Aliyah swasta. Oleh karena itu, agar kegiatan tersebut tepat sasaran dan efektif, perlu kiranya desain kegiatan dibuat sebaik mungkin sehingga benar-benar bermanfaat bagi pemberdayaan madrasah, terutama Madrasah Aliyah swasta yang sangat minim memperoleh kegiatan pembinaan dan program pendampingan bagi peningkatan mutu pendidikan.

Beberapa program yang tereduksi dalam kegiatan madrasah binaan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Ponorogo) pada tahun akademik 2010-2011 di kabupaten Ponorogo yang diikuti oleh beberapa guru dari beberapa Madrasah Aliyah, sangat dibutuhkan madrasah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu peserta kegiatan madrasah binaan STAIN Ponorogo, yakni kepala Madrasah Aliyah "Al-Azhar" Carangrejo Sampung, sebagai berikut:

Kegiatan madrasah binaan yang diselenggarakan oleh STAIN Ponorogo, terasa sekali manfaatnya, terlebih ketika ada tuntutan bagi Madrasah Aliyah harus mempunyai Rencana Kegiatan Madrasah sebagai acuan pengembangan madrasah. Hanya masalahnya, sumber daya manusia yang kami miliki sangat terbatas, akhirnya proses penyusunan Rencana Kegiatan Madrasah mengalami kendala. Ke depan kami berharap STAIN Ponorogo masih melaksanakan kegiatan pembinaan madrasah, terutama

terkait dengan isu baru bagi pengembangan madrasah dan utamanya terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan.

Pernyataan tentang manfaat program madrasah binaan yang dilakukan STAIN Ponorogo bagi Madrasah Aliyah swasta di wilayah kabupaten Ponorogo, juga dirasakan manfaatnya oleh kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Putri Al-Iman Babadan, sebagai berikut;

Program madrasah binaan STAIN Ponorogo bagi Madrasah Aliyah kami (Pondok Putri Al-Iman Babadan) sangat bermanfaat, terlebih ketika ada kewajiban agar Madrasah Aliyah memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana yang diatur dalam PP.19 Tahun 2005. Hanya saja kalau kami boleh berharap, terkait dengan delapan standar nasional pendidikan, di luar standar pendidik dan standar kompetensi lulusan, kami membutuhkan pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan standar isi dan standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana.

Selain menyatakan pentingnya manfaat program madrasah binaan yang telah dilakukan oleh STAIN Ponorogo, baik kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar Carangrejo Sampung maupun kepala Madrasah Aliyah pondok pesantren putri Al-Iman Babadan, menyatakan pentingnya intensitas kegiatan pembinaan madrasah dan jika memungkinkan semakin bertambahnya volume kegiatan madrasah binaan, utamanya terkait dengan bagaimana mengupayakan pencapaian standar nasional pendidikan. Pernyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh juru bicara Madrasah Aliyah pondok putri al-Iman Babadan, sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh STAIN Ponorogo, sangat memberikan manfaat bagi kami sebagai Madrasah Aliyah swasta. Namun demikian, terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan, kami berharap ada tambahan volume kegiatan. Selama ini kami baru mendapat pelatihan yang berhubungan dengan standar isi, namun standar nasional pendidikan lain belum. Oleh karena itu, kami berharap pada kesempatan yang lain dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh STAIN Ponorogo, terlebih terkait dengan kebijakan baru dan berbagai isu baru dalam pendidikan.

2. Makna Kegiatan Madrasah Binaan STAIN Ponorogo Tahun Akademik 2010-2011 bagi Madrasah Aliyah

Pelaksanaan kegiatan madrasah binaan STAIN Ponorogo dikendalikan oleh divisi pengabdian masyarakat P3M STAIN Ponorogo. Namun demikian, realisasi kegiatan di lapangan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Jurusan Tarbiyah, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, dan trainer yang dianggap memiliki keahlian yang sesuai dengan tema kegiatan yang hendak dilaksanakan.²¹ Pada tahun 2010-2011, kegiatan-kegiatan yang didesain meliputi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan mutu guru dan siswa. Beberapa kegiatan madrasah yang dilaksanakan, di antaranya meliputi; kegiatan Penyusunan Renacana Kegiatan Madrasah (RKM), penulisan karya ilmiah bagi siswa, pembelajaran berbasis karakter.²²

Proses penentuan kegiatan untuk madrasah binaan pada tahun akademik 2010-2011, dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan:²³ secara *bottom up* dan *top down*. Pendekatan secara *bottom up*:²⁴ beberapa staf divisi pengabdian masyarakat melakukan kegiatan studi kelayakan dan studi pendahuluan tentang berbagai pelatihan yang dibutuhkan Madrasah Aliyah dalam waktu dekat. Kegiatan studi pendahuluan tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, misalnya dengan Mapenda di kantor Kementerian Agama kabupaten Ponorogo. Selain melakukan wawancara dengan Mapenda di kantor Kementerian Agama, pihak divisi pengabdian masyarakat STAIN Ponorogo melakukan wawancara dengan beberapa dosen pembimbing PPLK II yang ketepatan mendapat tugas untuk mendampingi kegiatan PPLK II di Madrasah Aliyah. Wawancara dengan dosen pembimbing PPLK II, sebagai langkah pemetaan terhadap isu-isu aktual yang dibutuhkan madrasah kaitannya dengan berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain untuk memenuhi hal tersebut, penggalan informasi diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui apakah program PPLK II sinkron dengan program yang diharapkan oleh madrasah.

21 Hasil wawancara dengan kepala P3M STAIN Ponorogo, periode 2010-2014.

22 Hasil wawancara dengan kepala divisi pengabdian masyarakat P3M STAIN Ponorogo Periode 2010-2014.

23 Hasil wawancara dengan kepala divisi pengabdian masyarakat P3M STAIN Ponorogo, Periode 2010-2014.

24 Hasil wawancara dengan kepala divisi pengabdian masyarakat P3M STAIN Ponorogo, Periode 2010-2014.

Pendekatan *top down*,²⁵ dilakukan dengan cara divisi pengabdian masyarakat melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak di P3M STAIN Ponorogo untuk menentukan program madrasah binaan yang hendak dilaksanakan meliputi kegiatan apa saja. Di antara beberapa pertimbangan dalam pengambilan penentuan program madrasah binaan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan visitasi dan akreditasi yang ada di masing jurusan di STAIN Ponorogo dan pertimbangan yang lain adalah untuk merespon isu-isu aktual yang berkembang, misalnya pembelajaran berbasis karakter. Berbagai kegiatan yang didesain oleh P3M STAIN Ponorogo, diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang lebih bagi pemenuhan standar nasional pendidikan, sehingga di masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan madrasah binaan dapat memberikan makna yang lebih besar, terutama terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah swasta yang secara umum. Harapan ini tentu tidak berlebihan, karena secara struktural, Madrasah-Madrasah Aliyah swasta sebenarnya di bawah naungan Mapenda Kementerian Agama, namun demikian faktanya banyak Madrasah Aliyah swasta yang belum mendapatkan pembinaan secara proporsional. Sehingga dengan adanya kegiatan madrasah binaan yang dilaksanakan STAIN Ponorogo, turut membantu mengurangi beban peningkatan mutu pendidikan madrasah yang diharusnya dikawal dan didampingi oleh para pengawas di lingkungan Mapenda Kementerian Agama.

3. Makna Pelaksanaan Madrasah Binaan bagi STAIN Ponorogo

Madrasah Aliyah di daerah sekitar kabupaten Ponorogo, merupakan aset yang berharga bagi STAIN Ponorogo dalam menjalin komunikasi yang efektif bagi pengembangan program-program pemberdayaan madrasah. Hal ini sebagai dijelaskan oleh Ketua STAIN Ponorogo²⁶ sebagai berikut:

Madrasah-Madrasah Aliyah di sekitar kabupaten Ponorogo merupakan aset yang berharga, bagi pengembangan program kemitraan STAIN Ponorogo. Kita berharap kerjasama dengan beberapa Madrasah Aliyah yang selama ini sudah berjalan melalui pelaksanaan kegiatan program madrasah binaan dan PPLK II diupayakan kualitasnya di masa yang akan datang lebih.

²⁵ Hasil wawancara dengan kepala divisi pengabdian masyarakat P3M STAIN Ponorogo, Periode 2010-2014.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ketua STAIN Ponorogo Periode 2010-2014, pada tanggal 19 September 2011, di ruang Ketua STAIN Ponorogo.

Harapan ketua STAIN Ponorogo agar pelaksanaan kegiatan madrasah binaan, ditingkatkan kualitasnya bukanlah tanpa alasan. Ketua STAIN Ponorogo, melihat bahwa komunikasi yang baik dengan beberapa Madrasah Aliyah, baik yang berada di wilayah kabupaten Ponorogo, maupun di beberapa kabupaten yang dekat dengan wilayah Ponorogo akan memberikan dampak bagi kemajuan STAIN Ponorogo di masa yang akan datang. Dampak tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan studi di STAIN Ponorogo. Oleh karena itu, untuk mempermudah peningkatan kualitas pendidikan di STAIN Ponorogo, maka kualitas pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah yang selama ini menjadi mitra melalui program madrasah binaan juga harus ditingkatkan.

Pelaksanaan program madrasah binaan, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para dosen di lingkungan STAIN Ponorogo untuk melaksanakan salah satu tri darma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Karena semakin banyak dosen STAIN Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, akan memberikan kontribusi tersendiri bagi perolehan predikat akreditasi di lingkungan program studi di STAIN Ponorogo. Oleh karena itu, melalui P3M, ketua STAIN menghimbau agar program madrasah binaan, intensitas dan kualitas kegiatan untuk ditingkatkan.

C. Analisa Data Penelitian

Lahirnya kegiatan madrasah binaan di lingkungan STAIN Ponorogo, pada tahun 2007 diilhami oleh kenyataan bahwa madrasah-Madrasah Aliyah swasta di sekitar wilayah kabupaten-kabupaten yang berada di Ponorogo kurang mendapatkan intensitas pembinaan. Bahkan ada kesan setiap ada perubahan kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah, kebanyakan Madrasah Aliyah swasta terlambat memperoleh informasi bahkan terlambat untuk mengadaptasi perubahan kebijakan tersebut. Salah satu contoh hal tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah, melalui PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Banyak Madrasah Aliyah swasta yang menganggap bahwa kebijakan tersebut sesuatu hal yang sulit untuk direalisasikan.

Kenyataan ini semakin nampak jelas, ketika Pemerintah mewajibkan dipenuhinya standar isi yang secara operasional pelaksanaannya diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor

23 tahun 2006, banyak Madrasah Aliyah swasta yang mengalami "shock". Kurikulum Berbasis Kompetensi yang terkenal dengan istilah kurikulum 2004 belum terserap dengan baik, sudah terjadi lompatan yang cepat, agar sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah membuat kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Banyak Madrasah Aliyah swasta yang dalam proses penyusunannya hanya "copy and paste" tanpa melalui sebuah proses yang benar-benar mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing madrasah. Problem ini semakin berat dirasakan oleh Madrasah Aliyah swasta, ketika intensitas pelatihan dan pendampingan untuk menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sangat minim. Komponen-komponen KTSP belum semuanya terpenuhi, kegiatan pembelajaran juga berjalan seadanya, terbatas pada rutinitas yang telah berjalan. Adanya peluang untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sekolah/ madrasah, melalui muatan lokal dan pengembangan diri, belum sepenuhnya dipahami landasan filosofis maupun landasan sosiologisnya.

Apabila fakta tersebut dianalisis secara lebih mendalam, mengapa kebanyakan Madrasah Aliyah swasta kurang bisa mengembangkan kurikulum dan terkesan mengalami *shock* ketika terdapat perubahan kebijakan? Terdapat beberapa asumsi yang menyebabkan mengapa situasi tersebut terjadi, di antara penyebabnya adalah; 1) Madrasah Aliyah swasta sering terlambat dalam memperoleh informasi tentang perubahan kebijakan tersebut, sebagai dampaknya pengembangan kurikulum juga menjadi lamban; 2) minimnya kegiatan sosialisasi yang diperoleh Madrasah Aliyah swasta, terutama hal-hal yang berhubungan dengan berbagai inovasi dalam praksis pendidikan, dampaknya sumberdaya manusia yang berada di Madrasah Aliyah swasta mutunya tetap rendah; 3) kebanyakan Madrasah Aliyah swasta belum mempunyai sumberdaya manusia yang kualifikasi dan kompetensinya memenuhi standar yang telah ditentukan, sehingga hal ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi pemenuhan standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu lahirnya kegiatan madrasah binaan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, secara sosiologis sebenarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas PTAIN dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih jika persoalan akuntabilitas tersebut, secara teoritik didekatkan dengan konsep ideal perguruan tinggi yang digagas oleh Soedijarto seperti berikut: Perguruan tinggi yang ideal adalah universitas yang menggabungkan tiga tradisi, yaitu

tradisi *undergraduate* Britania dengan *college* model Oxford dan Cambridge yang berorientasi riset model Jerman dan model pengabdian masyarakat ala Amerika Serikat.²⁷ Dalam konteks Indonesia, konsep perguruan tinggi yang ideal tersebut sebenarnya telah dituangkan dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang intelektual dan profesional, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat merupakan hakekat dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Sejalan dengan Soedijarto, H.A.R. Tilaar menjelaskan bahwa akuntabilitas sebuah perguruan tinggi dapat diukur dari sejauhmana perguruan tinggi tersebut memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sebagaimana pernyataannya sebagai berikut; dalam hal menjaga akuntabilitas, perguruan tinggi Islam di Indonesia sebaiknya mengikuti prinsip *land-grant college* Amerika Serikat, dimana orientasi program ini ditujukan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dengan cara perguruan tinggi memenuhi pembangunan suatu daerah hasil kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah federal.

Relevansi yang dimaksud dalam kajian ini adalah relevansi program-program yang dirancang perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata di dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, partisipasi dunia kerja dan industri merupakan suatu keharusan. Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebuah perguruan tinggi yang tidak mempunyai akuntabilitas sudah dapat dipastikan juga tidak mempunyai relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya dimaknai kebutuhan yang berhubungan dengan engembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan moral dan etika serta agama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Selain karena kepentingan untuk merealisasikan bentuk akuntabilitas STAIN Ponorogo bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat akademis, pemberdayaan Madrasah Aliyah dalam standarisasi pendidikan juga diilhami pentingnya madrasah untuk memiliki kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu pendidikan sehingga madrasah dapat mensejajarkan dirinya dengan sekolah sekolah-sekolah pada umum. Secara yuridis kedudu-

27 Ibid., 219.

kan madrasah dan sekolah menempati kedudukan yang sama. Namun demikian realisasinya banyak madrasah yang mendapat perlakuan yang berbeda, terutama dalam hal penerapan standar nasional pendidikan.

PENUTUP

Partisipasi perguruan tinggi agama Islam dalam program pemberdayaan dan pendampingan madrasah sangat diperlukan, terutama dalam penyebaran hasil temuan dan hasil penelitian yang diperlukan bagi perbaikan mutu pendidikan di madrasah. Secara konseptual suatu lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai nilai akuntabilitas, apabila lembaga tersebut terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat yang memilikinya. Pendidikan tinggi yang bertahta di atas menara gading sudah tentu tidak mempunyai akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi, maka perlu memperhatikan kepentingan pengguna jasa pendidikannya dalam hal ini masyarakat.

STAIN Ponorogo sebagai salah satu perguruan tinggi Islam yang berada di kabupaten Ponorogo, peran dan partisipasinya sangat diperlukan bagi madrasah aliyah. Karena secara historis antara STAIN Ponorogo sebagai PTAI dengan madrasah aliyah sebagai jenjang pendidikan di bawahnya mempunyai keterkaitan erat. Oleh sebab itu, agar berbagai program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam mempunyai relevansi dengan program pembelajaran di madrasah, secara induktif mestinya program-program tersebut mempertimbangkan kebutuhan madrasah aliyah yang ada di sekitar wilayahnya, terutama kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas madrasah. Pola pikir yang demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan, agar keberadaan STAIN Ponorogo menjadi lebih bermanfaat bagi madrasah-madrasah aliyah dan jaringan STAIN Ponorogo semakin luas, sehingga ke depan melalui program kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik STAIN Ponorogo maupun madrasah aliyah sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Ciputat: Logos. 2000.
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Nizar, Samsul & Syaifuddin, Muhammad. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rekasarsin, 1996)
- Priyono, Onny S. & Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LPES, 1994.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Aditama, 2009.
- Syam, Nur. *Model Analisis Sosial*. Surabaya: PNM, 2010.
- Syukri Zarkasyi, Abdullah. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press. 2005.
- Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.
- Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Bandung: Rineka Cipta, 2006.